

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Judi *Online*

1. Pengertian Judi *Online*

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu)⁶. Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

⁶ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi *internet* yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

2. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);

b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;

c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang

menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan⁷.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini

⁷ Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. hlm.105

menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.⁸

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁸ Lisa, pelaku tindak pidana, hlm.1, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses tanggal 6 november 2017

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses *internet* sebagai perantara.

Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi *online* meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa.⁹ Pelaku judi *online* yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas – malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian *online* lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke *internet* serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

⁹ Sahat M. Hasibuan, 2017, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, Ditreskrimsus Polda DIY.

3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Judi *Online*

Maraknya tindak pidana perjudian *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian *online* berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

4. Peraturan Mengenai Judi *Online*

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional.¹⁰

¹⁰ Niniek suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi *online* diatur dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi *online* terdapat pada:

- a. Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

B. Tinjauan tentang Pembuktian

1. Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan

membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu:

- a. pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction intime*).

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut¹¹.

¹¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.186-187

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rasionnee*)

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan

yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu¹².

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

- c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat – alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk

¹² Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm.187

menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim,

namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak

ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh jaksa penuntut umum yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa – peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Dalam acara pembuktian, Baik Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara

pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa: “Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”¹³

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain:

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
- 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hlm.11

demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.¹⁴

b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip satu saksi bukan saksi terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

¹⁴ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.20

Menurut M. Yahya Harahap: “Ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.”¹⁵

Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHP: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

d. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di persidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.267

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa: “Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.”¹⁶

2. Macam – Macam Alat Bukti

Dalam mencermati dan memperoleh pengertian apa sebenarnya barang bukti dalam pengertian yuridis, terlebih dahulu dipilih istilah istilah hukum yang berkaitan dengan hukum pembuktian.

Mengenai alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Benda sitaan adalah semua benda yang berada dalam penyitaan termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian. Barang bukti ialah benda sitaan yang dipakai dan digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan penuntutan.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.321

Sekiranya dalam suatu penyidikan kepentingan pembuktian atas benda sitaan harus dikembalikan dalam status semula sebagaimana sebelum disita, juga bila dalam penyidikan ternyata perkara dihentikan penyidikannya, maka benda sitaan yang tidak jadi dijadikan barang bukti harus dikembalikan dalam status semula. Proses penyitaannya dicabut dan benda sitaan dikembalikan kepada siapa barang tersebut dahulu disita (tersita).

Demikian pula apabila benda sitaan tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan, akan tetapi menurut keyakinan hakim tidak termasuk dalam alat pembuktian (pasal 148 ayat (1) KUHAP, maka benda sitaan tersebut dalam putusan harus dikembalikan kepada terdakwa atau dari siapa benda itu disita.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; benda yang telah digunakan untuk mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana ; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,

dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam hubungan pengertian barang bukti dikaitkan dengan alat bukti (pasal 184 ayat (1) KUHAP) maka barang bukti adalah merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk memperoleh keyakinan akan terjadinya suatu tindak pidana. Contoh rumah, tanah, mobil, peralatan mesin, pisau, senjata api dapat diklasifikasi atau dimasukkan dalam alat bukti petunjuk. adapun dokumen, surat, surat, kuitansi, bpkb, stnk dan lainnya yang sejenis dapat klasifikasi dan dimasukkan dalam alat bukti.

Idealnya untuk memperoleh adanya keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan tersangka atau terdakwa yang bersalah melakukannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim yang membuktikan atau mengajukan kelima alat bukti yang sah tersebut (dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP). Akan tetapi, pasal 183 KUHAP berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Dunia hukum menghadapi tantangan berat tatkala era “masyarakat tanpa kertas” (seluruh aktifitas pencatatan digantikan oleh komputer) telah tiba. Era itu ditandai dengan: naiknya peranan

elektronic funds transfer system (EFTS). Terhadap kesalahan, pelanggaran maupun penyimpanan yang terjadi dalam EFTS, dengan bantuan virus atau tidak, membutuhkan penyidikan dan penuntutan yang setaraf, serta dukungan peraturan yang memadai seperti menyangkut pembuktian (*efidentary rules*).¹⁷

Kejahatan dibidang elektronik dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat elektronik (pada umumnya dengan menggunakan teknologi atau prasarana yang mendukung untuk melakukan kejahatan) dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Dalam hal ini, untuk mengantisipasi pelaku kejahatan dibidang elektronik, *cybercrime*, supaya mereka dapat dijarang dengan ketentuan kejahatan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan.

Penegak hukum harus dapat membuktikan, agar pembuktian dengan alat elektronik ini diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti yang dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, jika ada kejahatan atau persangkaan orang melakukan kejahatan dibidang elektronika ini maka dapat dipakai bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP.

¹⁷ Niniek suparni, 2009, *Cyberspace problematika danantisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

Namun, apakah hasil dari alat elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah oleh hakim. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapat benar – benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau yang terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik, hendaknya mendapat pengesahan atau pengakuan dari pejabat yang berwenang akan hal tersebut, supaya apa yang dihasilkan benar sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti itu tidak dapat dihadirkan.

Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagai mana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, perlu dijelaskan bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang – orang yang benar mengetahui dan mengerti mengenai alat – alat elektronik yang akan dihadirkan dipersidangan untuk menguatkan bahwa terdakwa benar benar telah melakukan kejahatan dibidang elektronik beserta bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi kejahatan dibidang elektronik.

Perlu diperhatikan pula oleh para pengguna elektronik untuk keamanan dari alat tersebut, agar digunakan alat elektronik lain yang dapat merekam semua transaksi yang dilakukan oleh setiap orang yang menggunakan jasa elektroniknya, baik itu berupa tape, video, tv, dimana alat ini nantinya memudahkan untuk mengecek ulang, apakah

orang tersebut pada saat terjadinya peristiwa kejahatan itu benar – benar telah menggunakan jasa elektronik.

Permasalahan lain adalah mengenai benda sitaan elektronik yang memang diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian. Dengan demikian, barang bukti tersebut sudah melekat dalam kasus perkara. Bahwa akhir – akhir ini banyak terjadi tindak pidana yang menggunakan sarana peralatan elektronik, misal kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana perangkat komputer. Bahwa komputer terdiri atas komponen: peralatan CPU (*central procesing unit*); monitor; keyboard; floppy disk; printer.

Pembuktian terhadap barang bukti elektronik, tidak bisa langsung memakai peralatan peralatan komputer tersebut sebagai barang bukti untuk digunakan dalam rangka pembuktian. Akan tetapi, terlebih dahulu harus meneliti, menganalisis, kemudian didukung dengan alat bukti lain. Kemudian disimpulkan bahwa barang bukti elektronik tersebut dipakai untuk dan dalam pembuktian.

Mengenai komponen atau peralatan komputer yang dapat diklasifikasi sebagai barang bukti benda bergerak yang dalam kaitan alat bukti (pasal 184 KUHAP) disebut sebagai alat bukti petunjuk adapun keterangan dari orang yang ahli dan menguasai baik terhadap peralatan elektronik perangkat komputer disebut dalam kaitan alat bukti (Pasal 184 KUHAP) sebagai keterangan ahli. Juga keterangan

dari orang yang ahli memprogram dan mengendalikan serta menggunakan peralatan komputer tersebut, serta sebagai keterangan ahli. Kertas yang dikeluarkan dari printer yang merupakan hasil rekayasa dan penyalahgunaan, sehingga berhasil membuat transfer dari dokumen atau surat yang keluar dari printer disebut sebagai alat bukti surat. Untuk mengambil suatu kesimpulan pembuktian bahwa alat bukti surat tersebut merupakan hasil rekayasa yang dilakukan pelaku tindak pidana, maka keterangan kedua ahli komputer diatas dapat menjelaskan dan menerangkan bahwa *floppy disk* yang digunakan oleh pelaku dapat mengeluarkan kode – kode atau dokumen atau surat sebagaimana alat bukti surat tersebut.

3. Pembuktian Kasus *Cybercrime*

a. Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

Dalam BAB I Ketentuan Umum Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1) Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik itu sendiri merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan pada pengertian diatas bahwa Informasi Elektronik merupakan sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan Transaksi elektronik itu sendiri merupakan perbuatan hukumnya. Jadi informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah satu kesatuan dalam sistem komputer yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistem elektronik itu sendiri merupakan sistem komputer yang mencakup perangkat keras lunak komputer, juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik; digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang,

memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirim atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan Sistem Informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Di sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional, merupakan keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.¹⁸

b. Perkembangan Kasus Cybercrime

Perkembangan masyarakat di era informasi dan semakin berkembangnya teknologi informasi pada akhirnya membuat *varian* atau bentuk kejahatan dalam era informasi semakin berkembang. Untuk menjerat jenis kejahatan ini harus diperhatikan ketentuan perundang – undangan yang ada.

Cepatya perkembangan dan akseptabilitas *internet* sebagai infrastruktur alternatif modern, tidak berarti eksistensinya tidak

¹⁸ Ibid. hlm. 110

memunculkan permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Masalah teknis yang dimaksud misalnya masalah realibilitas teknologi elektronik itu sendiri, inti teknologi dan piranti pendukungnya dalam hubungannya dengan penggunaannya sebagai media. Sedangkan masalah non teknis adalah masalah masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang lain dari aplikasi teknologi elektronik itu sendiri, baik yang bersifat substantif maupun yang bersifat prosedural.

Permasalahan yang bersifat substantif, yaitu keaslian *data message*, keabsahan (*validity*), kerahasiaan (*privasi*), keamanan (*security*), dan ketersediaan (*available*).

Permasalahan yang bersifat prosedural, yaitu pengakuan dan daya mengikat putusan hakim suatu Negara lain untuk diberlakukan dan dilaksanakan di Negara lawan, sekalipun hal ini memakai Instrumen – instrumen internasional, seperti konvensi Brussel, Lugano yang memberikan contoh *jurisdiction exorbitant* menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks.

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, sebenarnya yang telah memberikan pengetahuan bahwa kehadiran teknologi komunikasi dan informasi yang memanfaatkan media *internet*, menuntut adanya perlindungan, baik dari segi teknologi maupun yuridis. Dari segi teknologi, harusnya penyedia jasa layanan (ISP) memakai teknologi yang mampu memberikan keamanan kepada

pengguna (*user*). Model teknologi yang mampu memberikan pengamanan ini diantaranya menggunakan teknik kriptografi. Dari segi yuridis dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur hubungan secara elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah.

c. Pembuktian Kasus *Cybercrime*

Cybercrime, khususnya kejahatan terhadap program komputer adalah jenis tindak pidana yang sulit dideteksi. Tidak seperti kejahatan konvensional biasa.

Untuk membuktikan, apakah benar terdakwa bersalah, atau untuk mencari kebenaran materiil, diperlukan suatu pemeriksaan di depan pengadilan. Sesuai tujuan hukum acara pidana berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa: “tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan, apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu yang dapat dipersalahkan.

Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah tanpa melalui proses pembuktian, pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang – undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Dalam kasus *cybercrime*, khususnya terhadap komputer dan program komputer, masalah pembuktian ini menjadi bagian yang sangat penting, tetapi juga sulit. Pembuktian merupakan syarat memberikan keyakinan pada hakim agar dapat menjatuhkan putusan. Hakim dilarang memberi putusan jika ia sendiri tidak mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Pasal 183 KUHAP mengatur: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dan usaha untuk memperoleh keyakinan hanya boleh berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, yang terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mengenai hal hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, untuk mencegah jangan sampai persidangan mengarah kepada

pembuktian yang berlarut – larut, akhirnya tidak memenuhi asas hukum acara pidana, yaitu persidangan yang cepat dan murah. Jadi, hakim tidak boleh mendasarkan keyakinannya pada alat – alat bukti lain selain yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP.¹⁹

Kejahatan judi *online* merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan, karena dalam pasal 184 KUHP telah diberikan pembatasan berbagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Maka pembuktian kejahatan judi *online* yang merupakan *cybercrime* harus mengikuti ketentuan tersebut. Kini menjadi tugas Penuntut Umum untuk mengajukan alat – alat bukti tersebut didepan persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHP yang dapat digunakan dalam mengadili *cybercrime* terhadap perjudian *online* adalah keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Ketiga alat bukti ini adalah alat – alat bukti yang paling esensiil memberi pembuktian yang maksimal sehubungan dengan kejahatan siber yang semakin pesat perkembangannya. Tidak berarti keterangan saksi (yaitu saksi korban dan saksi lain) dan keterangan terdakwa bukan merupakan

¹⁹ Niniek suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122

alat bukti penting, hanya saja kurang dapat memberikan pembuktian yang maksimal jika dibandingkan alat – alat bukti lain.

Lebih jauh lagi dalam tindak pidana perjudian *online* jarang ada orang yang dijadikan saksi, tidak ada orang yang bisa mengetahui telah atau sedang terjadi perjudian *online* kecuali secara kebetulan. Padahal saksi menurut pasal 1 butir 26 KUHAP, haruslah orang yang melihat, mendengarkan atau mengalami sendiri tindak pidana. Karena itu, sulit mengandalkan pembuktian pada keterangan saksi. Juga bila menggantungkan harapan pada terdakwa. Terdakwa tidak memberikan keterangan dibawah sumpah, terdakwa dapat berbohong atau menyatakan ia tidak bersalah. Bahkan yang sering terjadi adalah, terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik dengan alasan diintimidasi ketika pemeriksaan, sehingga umumnya hakim menyatakan bahwa keterangan yang akan dipakai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi didepan persidangan (sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Berita acara dari penyidik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian. Sehubungan dengan itu, alat bukti keterangan ahli, surat, dan petunjuk menjadi penting artinya bagi proses pembuktian kejahatan perjudian *online*. keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus. Untuk membuktikan bahwa

terdakwa telah melakukan perjudian *online*, tentu dibutuhkan keterangan ahli komputer di persidangan.

Permintaan keterangan ahli dimungkinkan oleh pasal 120 KUHAP, yaitu dimintai oleh penyidik. Akan tetapi dalam KUHAP terlihat adanya beberapa kategori ahli, yaitu dokter ahli kedokteran kehakiman dimana keterangan yang diberikan disebut keterangan ahli lainnya. Definisi ahli lainnya ini tidak terdapat dalam KUHAP, sehingga status dan nilai pembuktian keterangan ahli komputer belum jelas. Jadi, tergantung kejelian Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim agar menerima ahli komputer dan keterangannya sebagai alat bukti yang sah.

Mengenai alat bukti surat, hal ini berhubungan dengan hasil *print out* komputer. Dalam pasal 187 KUHAP yang isinya penggolongan surat, tidak disebutkan mengenai hal ini. Program komputer dibuat dengan menggunakan bahasa tertentu, lazimnya disebut Bahasa Tingkat Tinggi, yang disusun sedemikian rupa menurut aturan baku masing – masing bahasa pemrogram. Dasar dari program dan pemrograman yang dibuat dikenal dengan istilah *source code*. Oleh karena itu, *print out* merupakan alat bukti yang penting, yaitu sebagai alat bukti surat yang sah, walaupun dalam praktik peradilan pidana belum pernah ada yurispudensinya.

Dalam menghadapi berbagai kendala sebagaimana diatas, perlu diupayakan jalan keluar dengan mengoptimalkan sarana hukum yang tersedia. Optimalisasi sarana hukum tersebut antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal alat bukti yang ada belum memenuhi aturan yang ada, maka alat bukti elektronik seperti rekaman secara hasil faksimili atau fotokopi dapat dijadikan petunjuk;
- b. Apabila alat bukti tersebut ditunjang dengan keterangan ahli dibidangnya, misalnya ahli pita suara atau ahli lainnya yang menyatakan keaslian rekaman tersebut maka dapat dijadikan bukti yang sah;
- c. Dalam hal faksimili, yaitu dengan pernyataan dan pengiriman faksimili yang menyatakan keaslian faksimili tersebut dibuat oleh pejabat resmi, misalnya notaris atau perwakilan Indonesia diluar negeri (kedutaan atau konsolat), apabila faksimili tersebut berasal dari luar negeri;
- d. Demikian pula halnya untuk fotokopi, harus diikuti pernyataan serupa.²⁰

Disinilah letak diperlukannya keahlian penuntut umum dalam memberikan argumen kepada hakim, sehingga print-out dapat

²⁰ Niniek suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126

dimasukkan ke dalam pengertian alat bukti yang sah surat sebagaimana dimaksud pasal 187 KUHAP.

Pembuktian kasus judi *online* tetap berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Serta dengan telah diberlakukannya Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang – undang tersebut, baik diwilayah hukum indonesia maupun diluar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum diindonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan indonesia (pasal 2 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik).

Pengaturan alat bukti dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada:

Pasal 44 bahwa: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang – Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagai mana dimaksud dalam ketentuan perundang – undangan, dan

- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Pasal 1 Angka 1: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 Angka 4: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Judi *Online*

1. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab

kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah

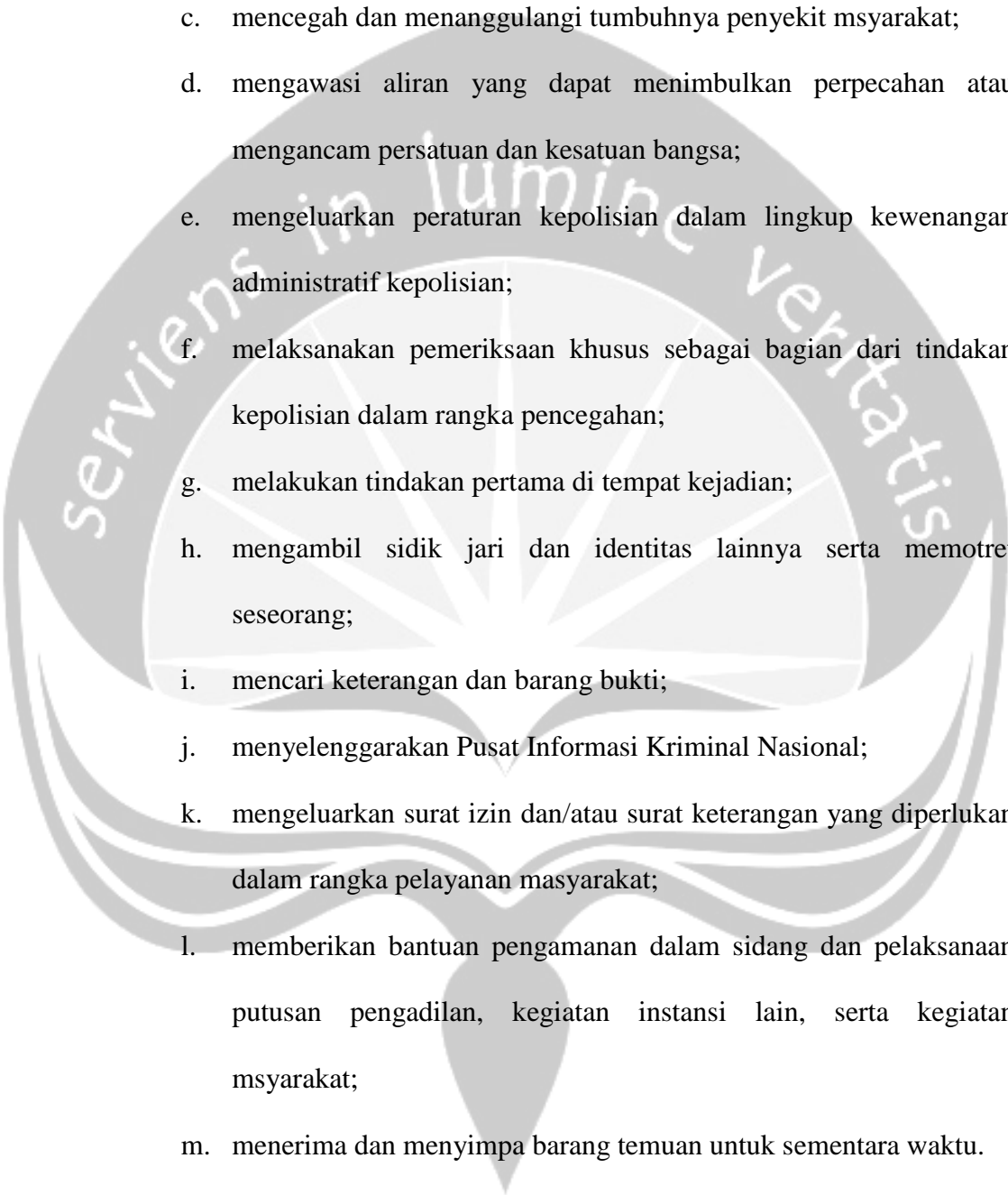
yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas – tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

- 
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang

telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dalam Undang – Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundang – undangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.

2. Upaya preventif

Upaya Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk,

atau diingatkan supaya jangan melakukan tindak pidana perjudian *online*.

Upaya Preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian *online* tersebut adalah upaya pencegahan atau Preventif melalui penyuluhan – penyuluhan baik di sekolah maupun di masyarakat, dimana dalam memberikan penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Bimmas). Sedangkan upaya lain dari kepolisian bilamana upaya penanggulangan perjudian *online* telah dilakukan tidak berjalan dengan efektif maka upaya yang pihak kepolisian dapat lakukan berupa pembinaan. Dalam hal kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lainnya atau dengan masyarakat dalam menanggulangi perjudian *online*, yang dalam hal ini secara khusus tugas pokok Dit Reskrimsus adalah penindakan saja, namun dari satuan kerja lainnya seperti Dit Bimmas yang mengemban fungsi pencegahan atau preventif adanya kegiatan penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan disekolah maupun dimasyarakat. Mengenai Peraturan hukum yang berlaku saat ini dalam menindak pelaku judi *online* menurut pihak kepolisian Polda D.I.Y belum efektif dikarenakan sulit menemukan dan mengungkap perjudian secara *online*.

3. Upaya Represif Kepolisian

Upaya Represif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Atau, merupakan

usaha-usaha yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Dalam penanggulangan secara represif cara – cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu, kemudian langkah – langkah yang biasa ditempuh bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kepolisian dalam menanggulangi kasus judi *online* yang terjadi khususnya fungsi reserse yang bertindak dalam bidang represif dimana berfungsi menindak setiap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dimasyarakat sehingga mengganggu dan merusak situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada.

Fungsi reserse itu sendiri dalam kepolisian yang memiliki peranan dalam menangani judi *online* yang termasuk dalam *cybercrime* dengan dasar hukum yang kuat. Sehingga terbentuk satuan *cybercrime* dimana dasarnya adalah Keputusan Kapolri no: KEP/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja tingkat Polda, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kepolisian Polda DIY melakukan razia atau operasi pekat (penyakit masyarakat) guna menanggulangi

perjudian yang terjadi, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian guna mencari dan mengumpulkan bukti – bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian dengan tujuan untuk mengungkap modus dari perjudian *online*, dan jika alat bukti sudah cukup maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku perjudian *online*.

